

## Analisis Model Good School Governance pada Sekolah Vokasi

Fajriana<sup>1</sup>, Siraj<sup>2\*</sup>, Atta Illah<sup>3</sup>, Muhammad Chairil Abnu<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Malikussaleh

<sup>2,3,4</sup> Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Malikussaleh  
Email: [fajriana@unimal.ac.id](mailto:fajriana@unimal.ac.id)<sup>1</sup>, [siraj@unimal.ac.id](mailto:siraj@unimal.ac.id)<sup>2</sup>, [atta.180750009@mhs.unimal.ac.id](mailto:atta.180750009@mhs.unimal.ac.id)<sup>3</sup>,  
[muhammad.180750028@mhs.unimal.ac.id](mailto:muhammad.180750028@mhs.unimal.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Aceh berdasarkan lulusan dari universitas sebesar 6,53%, diploma 7,27%, SMK 10,55%, SMA 8,88%, SMP 4,76% dan pengangguran tamatan SD sebesar 2,88%. Studi pendahuluan pada beberapa SMK di Kota Lhokseumawe ditemukan suatu fenomena empirikal dan teorikal yang sistematis terkait manajemen mutu SMK. Orientasi konsensus merupakan prinsip *good school governance* yang memediasi berbagai kepentingan untuk mencapai konsensus luas tentang apa yang menjadi kepentingan terbaik warga sekolah mengenai kebijakan dan prosedur. Tujuan penelitian ini difokuskan pada upaya menghasilkan gambaran implementasi dan analisis penyelenggaraan pendidikan vokasi yang berorientasi pada konsensus sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan kriteria dunia usaha dan industri. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat *library research*. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah daftar check-list klasifikasi bahan penelitian, skema/peta penulisan dan format catatan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*Content Analysis*). Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan kinerja SMK didasari pada prinsip pendidikan berbasis konsensus dengan mengotimalkan kepemimpinan, strategi, pelanggan, pengukuran analisis dan manajemen pengetahuan, tenaga kerja, operasi, dan hasil. Kriteria tersebut harus berlandaskan pada visi misi SMK, yang menjadi nilai dan konsep utama arah pengembangan sekolah, sehingga dapat memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan.

**Kata Kunci:** *Good School Governance, Pendidikan Vokasi.*

### Abstract

The open unemployment rate (TPT) in Aceh is based on university graduates of 6.53%, diplomas of 7.27%, vocational schools of 10.55%, high schools of 8.88%, junior high schools of 4.76% and unemployment of elementary school graduates of 2.88%. Preliminary studies on several vocational schools in Lhokseumawe City found a systematic empirical and theoretical phenomenon related to SMK quality management. Consensus orientation is a principle of *good school governance* that mediates various interests to reach a broad consensus on what is in the best interest of school citizens regarding policies and procedures. The purpose of this study is focused on efforts to produce an overview of the implementation and analysis of the implementation of vocational education that is oriented towards consensus so as to produce quality graduates in accordance with the criteria of the business world and industry. The research method uses a descriptive qualitative approach that is *library research*. The research instruments in this study are a check-list of classification of research materials, writing schemes / maps and the format of research notes. The data analysis technique used in this study is the content analysis method (*Content Analysis*). The results of the analysis show that the improvement of SMK performance is based on the principle of consensus-based education by optimizing leadership, strategy, customers, measurement of analysis and knowledge management, workforce, operations, and results. These criteria must be based on the vision and mission of SMK, which is the main value and concept of the direction of school development, so that it can meet and even exceed the National Education Standards.

**Keywords:** *Good School Governance, Vocational Education.*

### PENDAHULUAN

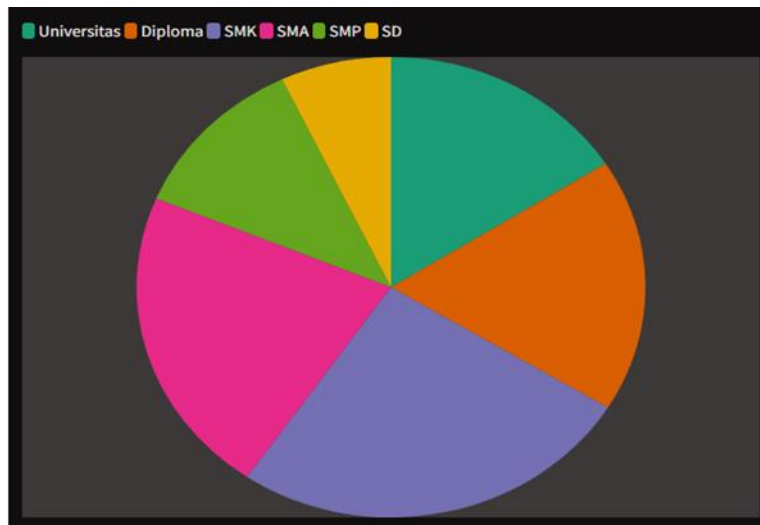
Saat ini dunia telah memasuki era perekonomian berbasis pengetahuan (*knowledge based society and economy*) yang terbuka (digital) dan bertumpu pada persaingan bebas. Era perekonomian berbasis pengetahuan ditandai dengan persaingan dalam menguasai pengetahuan dan perlombaan ketat penemuan pengetahuan baru. Era digital ditandai dengan perubahan pesat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan penguasaan media TIK yang merata di tengah makin cepat dan meluasnya cakupan penyebaran dan pertukaran informasi. Era keterbukaan dan persaingan bebas ditandai dengan mudahnya sekat-sekat antarnegara termasuk dengan pembentukan berbagai kesepakatan pembukaan pasar regional dalam berbagai ukuran cakupan kawasan dari sekelompok negara bertetangga, satu benua, dan lintas benua seperti MEA, AFTA, dan APEC.

Agar peserta didik mampu bersaing dalam karir pada masa depan dan menjadi aset pembangunan, pendidikan vokasi hendaknya dikelola dalam konteks pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan vokasi pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu membekali lulusannya dengan berbagai kecakapan, yaitu kecakapan hidup dan berkarier, kecakapan dalam belajar dan berinovasi, serta kecakapan memanfaatkan informasi, media, dan teknologi.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 15, keberadaan SMK dirancang untuk mempersiapkan lulusannya bekerja di bidang tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan menengah kejuruan ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja, baik bekerja secara mandiri maupun bekerja pada industri tertentu. Sekolah Menengah Kejuruan dituntut untuk mampu menghasilkan lulusan sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga, masyarakat, dan dunia usaha dan dunia industri. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang memiliki kesiapan kerja, kompetensi kerja sesuai dengan bidangnya, memiliki kemampuan adaptasi, dan daya saing yang tinggi.

Kesiapan kerja sangat diperlukan karena merupakan suatu kesiapan mental dan fisik serta sumberdaya kejuruan lainnya dalam memasuki dunia kerja yang kompetitif (Robert dan Diene, 2004). Tujuan utama pendidik dan pemangku kebijakan pendidikan adalah bagaimana dapat membentuk peserta didik pada proses pembelajaran yang berorientasi pada kesiapan kerja. Sebagaimana pendapat Finch & Crunkilton (1979) yang mengemukakan bahwa pendidikan vokasi memiliki karakteristik, diantaranya: (1) Lebih menekankan pada kemampuan untuk kerja; (2) penyiapan untuk mendapatkan pekerjaan; dan (3) menekankan pada pengembangan keterampilan. Sesuai dengan karakteristik tersebut, maka pembentukan kompetensi peserta didik guru dan tenaga kependidikan lainnya merupakan suatu proses pendidikan yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak terkait. Irwanto (2019) menjelaskan bahwa SMK memerlukan mitra seperti SMK lain, LPTK, pemerintah daerah, dinas pendidikan setempat, industri, asosiasi profesi kependidikan dan lembaga-lembaga lain yang relevan. Untuk itu, diperlukan ada dan terpeliharanya jaringan kemitraan yang berkelanjutan antara SMK dengan semua unsur tersebut. Kemitraan SMK dengan lembaga mitranya harus didasarkan pada prinsip manfaat timbal balik dalam meningkatkan kemitraan dan mutu kinerja pihak-pihak yang bermitra.

Namun pada kenyataannya, penyerapan tenaga kerja lulusan SMK mengalami berbagai macam kendala diantaranya kesiapan mental bekerja masih sangat rendah, meskipun untuk kemampuan teknis yang dibutuhkan dalam pekerjaan sebenarnya sudah dikuasai (Sallata, dkk., 2021). Kenyataan di lapangan ditemukan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, hal tersebut terlihat dari data Badan Pusat Statistik Aceh 5 November 2021 bahwa pengangguran dari tamatan SMK masih yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 10,55%.



Gambar 1 Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan di Aceh  
Sumber: Data BPS Aceh (2021)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Aceh berdasarkan lulusan dari universitas sebesar 6,53%, diploma 7,27%, SMK 10,55%, SMA 8,88%, SMP 4,76% dan pengangguran tamatan SD sebesar 2,88%. Kota Lhokseumawe tercatat sebagai kota dengan penduduk pengangguran tertinggi di Aceh. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe tahun 2021 menyebutkan bahwa total pengangguran sebanyak 10.804 orang yang didominasi oleh lulusan SMK.

Salah satu upaya yang harus segera dilakukan adalah dengan membangun pola kerjasama antara sekolah dengan industri secara intensif. Beberapa kegiatan sekolah selalu melibatkan dunia industri, seperti praktik kerja industri, *on job training*, kunjungan industri, dan *teaching factory*. Terkadang industri yang terlibat tidak terlalu berperan banyak karena industri biasanya mempunyai pola pikir pragmatis terhadap keuntungan bisnis (Wibowo, 2016). Kesenjangan antara pendidikan dan pekerjaan akan semakin melebar jika kebutuhan pekerja tidak sesuai kebutuhan industri. Untuk mempersempit kesenjangan tersebut pendidikan perlu memasukkan kebutuhan yang diharapkan industri. Indriyani (2018) mengungkapkan bahwa sekolah harus menggunakan pendekatan pada dunia usaha dan dunia industri agar ikut serta mengembangkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pengajaran sehingga lulusan SMK menjadi tenaga kerja yang berkompeten.

Studi pendahuluan pada beberapa SMK di Kota Lhokseumawe ditemukan suatu fenomena emperikal dan teorikal yang sistematis terkait manajemen mutu SMK. Lulusan SMK tidak dapat menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri dan tidak dapat terserap dalam lapangan kerja sesuai dengan kondisi era digital saat ini. Penjabaran permasalahan utama dalam pengelolaan sekolah selama ini adalah: (1) belum optimalnya keterlibatan pihak usaha, industri, dan masyarakat dalam penyusunan kurikulum; (2) kurikulum belum sepenuhnya sesuai dengan era digitalisasi; (3) pola kerjasama sekolah dengan industri hanya sebatas tempat magang siswa; (4) banyak lulusan yang masih enggan mengikuti sertifikasi kompetensi; dan (5) ketersediaan guru produktif yang belum memadai, banyak guru produktif yang tidak mutakhir dalam perkembangan teknologi yang dipakai dalam program keahliannya sehingga memengaruhi proses belajar mengajar yang juga berpengaruh pada kompetensi peserta didik. Hal ini tentu berakibat pada minimnya lulusan SMK yang bekerja sesuai dengan kompetensi keahliannya.

Pendidikan berbasis konsensus diperlukan dengan sistem pembelajaran campuran yang memadukan antara pembelajaran berbasis sekolah dan pembelajaran berbasis praktik kerja. Namun pembelajaran berbasis praktik kerja yang berkualitas sulit untuk diterapkan dan lebih, meskipun ada beberapa keberhasilan dalam merekrut pekerja yang berasal dari sekolah berbasis praktik (Bailey, Hughes, & Barr, 2000; Wieler & Bailey, 1997).

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas adalah dengan tata kelola sekolah yang baik dengan menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh baik antar warga sekolah maupun hubungan sekolah dengan pihak dunia

usaha dan dunia industri. Penyelenggaraan sekolah harus berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang akan dilaksanakan di sekolah. Orientasi konsensus merupakan prinsip *good school governance* yang memediasi berbagai kepentingan untuk mencapai konsensus luas tentang apa yang menjadi kepentingan terbaik warga sekolah mengenai kebijakan dan prosedur. Tujuan penelitian ini difokuskan pada upaya menghasilkan gambaran implementasi dan analisis penyelenggaraan pendidikan vokasi yang berorientasi pada konsensus sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan kriteria dunia usaha dan industri.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah model penelitian dengan teknik berpikir induktif, menjadikan manusia (peneliti) sebagai instrumen utama penelitian dan dilakukan dengan pengumpulan data yang bersifat kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat *library research* yang menggunkan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan secara filosofis dan teoritis.

Data yang disajikan adalah data yang berbentuk kata yang memerlukan pengolahan supaya ringkas dan sistematis (Muhadjir, 1998). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya (Arikunto, 2010). Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah daftar check-list klasifikasi bahan penelitian, skema/peta penulisan dan format catatan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (Content Analysis). Analisis ini digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya (Krippendorff, 1993). Dalam analisis ini akan dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu pemegang peranan yang penting dalam penyiapan tenaga kerja dituntut untuk selalu dapat mengikuti kebutuhan pasar yang terus berkembang. Tujuan pendidikan SMK adalah mampu menghasilkan lulusan yang mampu bekerja, mengembangkan diri, wirausaha muda sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Berikut ini adalah kesenjangan antara pendidikan dan pekerjaan seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Penyebab Kesenjangan Pendidikan dan Industri  
Sumber: Direktorat Pembinaan SMK (2019)

Hubungan yang tidak sempurna antara pendidikan dengan pekerjaan disebabkan oleh keterbatasan dalam identifikasi persyaratan pekerjaan, dinamika pekerjaan, tugas kerja yang tidak pasti dari tenaga kerja berkualifikasi tinggi, kesenjangan perencanaan, konsep kurikuler yang beragam, dan semakin

pentingnya pendidikan seumur hidup. Penyebab kesenjangan antara pendidikan dan pekerjaan memiliki beberapa faktor, yaitu: faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: 1) kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan pihak sekolah, kualitas guru yang masih rendah; 2) keterbatasan lapangan pekerjaan, dan 3) kualitas sumber belajar yang digunakan belum memadai. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi kesenjangan antara pendidikan dan pekerjaan meliputi: 1) lingkungan yang tidak mendukung; 2) kurangnya pemerataan pendidikan di setiap daerah, dan 3) kreativitas yang dikembangkan peserta didik masih rendah. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa pendidikan dan lapangan kerja tidak selalu *linier* atau berbanding lurus dengan keilmuan yang telah dipelajari.

Sekolah sebagai penyedia pendidikan yang berkualitas tidak memiliki pilihan selain memberikan ruang dan memfasilitasi bagi siswanya untuk mengadopsi teknologi ke dalam sekolah. Visi abad 21, negara-negara mengharapkan guru dan siswa berperilaku sebagai masyarakat digital yang terinformasi dan bertanggung jawab. Pendidikan saat ini adalah membawa teknologi digital ke dalam sekolah untuk menumbuhkan dan mengembangkan literasi digital yang tertransformasi dan kritis. Teknologi digital berperan dalam menghasilkan pendidikan dengan menawarkan cara-cara baru untuk belajar, berbagi, menciptakan, berkomunikasi, serta berkolaborasi.

*Governance* pada dasarnya adalah tentang kepemimpinan yang efektif yang dapat digunakan sebagai mekanisme untuk menciptakan proses, sistem dan kontrol yang berlaku serta perilaku yang sesuai untuk memastikan keberlanjutan dan kontinuitas jangka panjang dalam suatu organisasi seperti sekolah (FEDSAS, 2015). *Governance* adalah penentu utama untuk pertumbuhan, pembangunan dan pengurangan kemiskinan (Dayanandan, 2013). *Governance* menggambarkan mekanisme yang digunakan organisasi untuk memastikan bahwa konstituennya mengikuti proses dan kebijakan yang ditetapkan (Kefela, 2011).

*Good governance* adalah persyaratan untuk semua materi administrasi publik dan dilaksanakan melalui kolaborasi, kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, sektor swasta dan organisasi non pemerintah (Saparniene & Valukonyte, 2012). *Good governance* juga dapat dianggap sebagai paradigma baru di bidang manajemen publik (Vyas-Doorgapersad & Aktan, 2017). Tata kelola yang baik berarti manajemen yang kompeten atas sumber daya dan urusan suatu negara dengan cara yang terbuka, transparan, akuntabel, adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Kefela, 2011). *Good governance* didefinisikan sebagai proses dan struktur yang memandu hubungan politik dan sosial ekonomi (VyasDoorgapersad & Aktan, 2017). Teori *democratic governance* identik dengan teori *good governance* karena sebagian besar negara dengan praktik tata kelola yang baik di dunia kontemporer adalah negara demokrasi liberal yang terkonsentrasi di Barat, khususnya di Eropa dan Amerika (Ekundayo, 2017). *Good governance* berupaya untuk melindungi hak asasi manusia warga negara serta berupaya membangun dan mempertahankan masyarakat yang progresif, sosial, ekonomi, politik dan spiritual (Kefela, 2011).

Tata kelola sekolah didasarkan pada keputusan dan tindakan yang diambil terkait dengan pendidikan siswa (Morgan, 2017: 8). Tata kelola yang lebih baik memiliki potensi untuk secara signifikan meningkatkan kualitas pendidikan yang ditawarkan di sekolah umum, memperluas pertumbuhannya, dan meningkatkan stabilitas keuangannya.

*Good governance* adalah serangkaian tanggung jawab, praktik, kebijakan, dan prosedur yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk memberikan arahan strategis untuk memastikan tujuan tercapai dan sumber daya digunakan secara bertanggung jawab dan dengan akuntabilitas. Praktik *Good governance* mendukung sekolah dengan membantu mereka mengelola sumber daya mereka sehingga mereka dapat memberikan pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan 2014-2020 *National Operational Program for School Skills and Learning Environments* dijelaskan bahwa tindakan untuk mendukung *governance* dan memperkuat kemampuan kelembagaan dapat berupa pelatihan manajer sekolah, eksekutif dan pejabat administrasi pusat dan perifer, studi penelitian, dan dukungan untuk standar tingkat layanan esensial dan pengembangan sistem kualitas.

Manfaat dari badan pengelola sekolah (*school governing body*) yang mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola dapat mencakup, antara lain hal-hal berikut: peningkatan kepemimpinan, pengambilan keputusan dan visi strategis; perbaikan mekanisme untuk memantau dan mengelola risiko; dan kepercayaan para pemangku kepentingan internal dan eksternal - seperti pelajar, pendidik, non-pendidik, orang tua, departemen pendidikan nasional dan provinsi dan masyarakat lokal di lingkungan sekolah

dengan demikian mengamankan komitmen mitra vital dan memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan bahwa organisasi dijalankan dengan cara yang tepat dan bertanggung jawab.

*Good governance* memiliki beberapa karakteristik utama yaitu partisipatif, berorientasi pada konsensus, akuntabel, transparan, etis, meritokratis, responsif, efektif dan efisien, berorientasi pada kualitas, adil dan inklusif, terdesentralisasi dan mengikuti aturan hukum (VyasDoorgapersad & Aktan, 2017). Secara umum, indikator dan penilaian tata kelola dianggap sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran pengambil keputusan, sektor swasta dan masyarakat sipil, termasuk akademisi dan media, tentang situasi terkini di negara tertentu (Khodary, 2016). Integrasi tata kelola yang baik dalam manajemen bermaksud untuk meningkatkan metode layanan dengan alasan untuk mencegah penipuan dan salah urus, mendorong pengambilan keputusan yang sehat, menghindari denda yang mahal, menciptakan atau mempertahankan citra perusahaan yang positif, menarik dan mempertahankan pembiayaan serta investasi.

*Good school governance* menjadi model manajemen yang layak diterapkan dalam pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan. Model manajemen berbasis GSG sebagai model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, tenaga kependidikan, orang tua siswa) bahkan dunia usaha dan industri, serta masyarakat secara lebih luas.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good school governance* merupakan tolak ukur suatu tata kelola yang dikatakan sebagai tata sekolah yang baik. Ada delapan prinsip *good school governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, keadilan, partisipasi, efektif dan efisien, dan berorientasi pada konsensus. Prinsip GSG tersebut dapat diimplementasikan pada kerja sama mitra tiga komponen utama *good school governance* yaitu pemerintah, pasar/swasta, dan masyarakat.

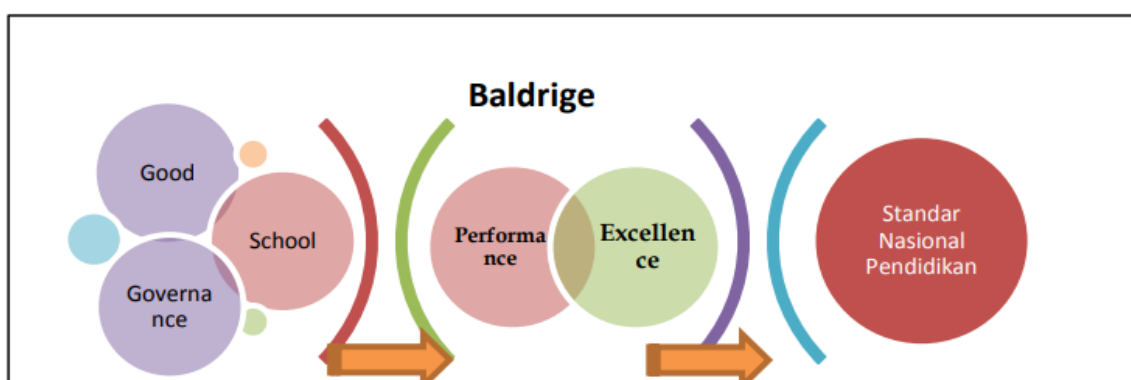
Berdasarkan buku Pedoman Akreditasi Sekolah tahun 2019 yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, arah kebijakan pelaksanaan akreditasi sekolah mengalami pergeseran yang lebih menekankan kepada kinerja. Pergeseran ini dimaksudkan agar badan akreditasi nasional untuk ikut ambil bagian dalam mendorong *continuous improvement* di sekolah ke arah yang lebih baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) perlu dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk mengetahui apakah satuan pendidikan atau program telah memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Herawan (2017) bahwa kepala sekolah menjadi teladan bagi para guru, staf dan siswa, bahkan ada guru yang mengidolakan kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah juga berperan sebagai manajer, mengatur berbagai sumber daya untuk terealisasinya *good governance* di sekolah. Selain itu kepala sekolah juga memotivasi warga sekolah untuk terealisasinya *good school governance*.

Peran guru yang muncul secara intens dalam implementasi *good school governance* adalah sebagai pelaksana. Sedangkan peran sebagai pendorong dan pemikir mengenai bagaimana proses *good governance* dilakukan, masih belum diketahui dan masih belum muncul secara masif. Prediksi akan sebab dari masalah ini adalah karena asumsi guru yang menganggap bahwa tugasnya adalah melakukan pembelajaran, sehingga berbagai hal yang terkait dengan *good governance*, mereka lebih memilih menjadi pelaksana, karena kewajibannya menjadi tanggungan pimpinan sekolah beserta komite sekolah.

Model temuan manajemen organisasi yang dapat meningkatkan kinerja SMK Negeri 4 Lhokseumawe untuk mewujudkan mutu SMK, yang dinilai dengan model pengukuran yang dapat memberikan hasil terbaik. Model manajemen yang diusulkan selanjutnya disebut *good school governance*.



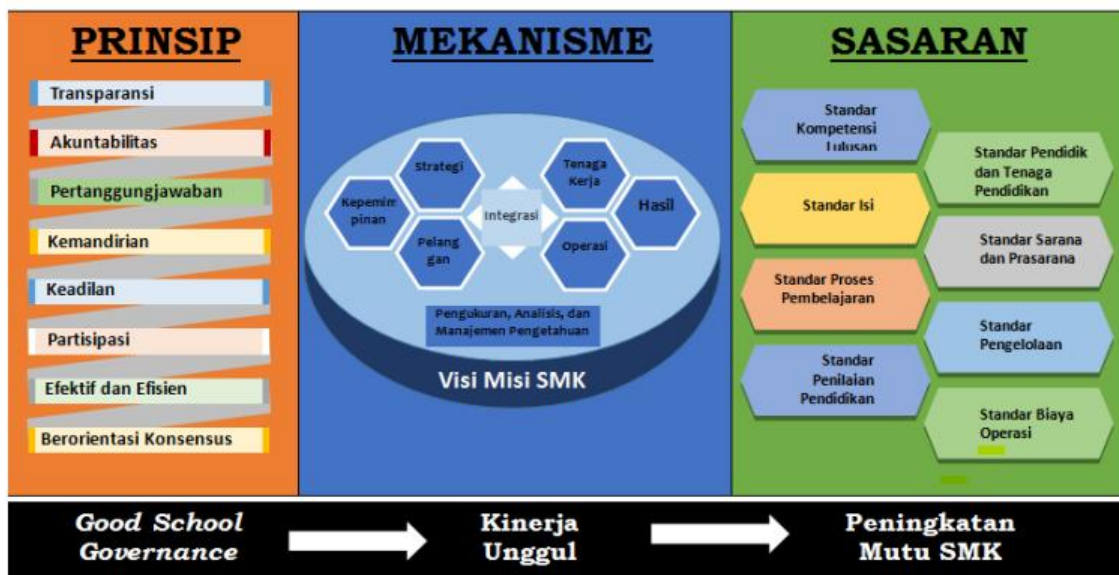
Gambar 3 Model *Good School Governance*

Indikator capaian kinerja yang baik dalam hal ini adalah, dengan menggunakan jenis penilaian apapun, baik penilaian SNP, MBS, TQM, Balance scorecard, maupun dengan Balridge Assessment maka organisasi SMK akan dapat memenuhi semua kriterianya.



Gambar 4 Indikator Capaian Kinerja Sekolah

Konsep Baldrige ini memiliki keunggulan jika diimplementasikan dalam rangka pengembangan sekolah bermutu, (1) lebih fleksibel untuk digunakan dalam dunia pendidikan maupun bisnis, (2) menggunakan proses selain hasil, (3) menetapkan kriteria mutu yang sangat jelas dan komprehensif, (4) variabel-variabelnya dapat diukur melalui kriteria yang ada, (5) kriteria mutu yang dikembangkan cukup holistik dan kontekstual. Prinsip dan mekanisme GSG dirancang agar organisasi sekolah, dalam hal ini SMK dapat memenuhi sasaran, dan sasaran yang utama dalam tercapainya SNP. Meski demikian, GSG dirancang agar organisasi sekolah juga lolos jika dilakukan penilaian kinerja berbasis MBS, TQM, BSC, maupun Balridge Performance Excellent.



Gambar 5 Model Peningkatan Kinerja SMK Dengan Berbasis *Good School Governance*

Model *good school governance* pada sekolah vokasi berbasis consensus pendidikan mewajibkan keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah dengan konsesus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi

keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga keputusan tersebut mempunyai kekuatan memaksa bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan good governance di sekolah, karena berbagai masalah yang dikelola di sekolah adalah persoalan-persoalan pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan warga sekolah yang terakomodasi.

Tata kelola sekolah yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh baik antar warga sekolah maupun hubungan sekolah dengan pihak eksternal dalam hal apa yang terbaik bagi peningkatan kinerja sekolah, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang akan dilaksanakan di sekolah.

Pembuatan kesepakatan-kesepakatan antara kepala sekolah dengan guru dan staf sekolah merupakan bagian dari perilaku yang sudah biasa dilakukan. Media untuk membuat berbagai kesepakatan adalah rapat rutin yang disepakati waktu, agenda dan tempatnya (misal rapat hari senin setelah jam pembelajaran selesai yang membahas tentang penyusunan perangkat pembelajaran berdasarkan aturan terbaru yang dilaksanakan di ruang aula sekolah). Selain itu, berbagai kesepakatan pihak sekolah juga dilakukan dengan pihak stakeholder sekolah, baik secara langsung maupun melalui fasilitasi komite sekolah. Rapat rutin pihak sekolah dengan komite sekolah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dengan komite (misal pada akhir bulan genap), kecuali apabila terjadi kondisi yang urgent yang menyangkut program pemerintah yang harus segera dilaksanakan sekolah, maka kepala sekolah secara langsung mengundang pengurus komite sekolah untuk mendiskusikannya. Kesepakatan-kesepakatan pun terjadi antara guru dengan siswa. Pelaksanaannya paling memungkinkan yaitu dilakukan di dalam kelas dan saat kegiatan upacara bendera. Selain waktu tersebut, kesepakatan dibuat berdasarkan pertemuan langsung guru dengan siswa.

## SIMPULAN

Peningkatkan kinerja SMK didasari pada prinsip pendidikan berbasis konsensus dengan mengotimalkan kepemimpinan, strategi, pelanggan, pengukuran analisis dan manajemen pengetahuan, tenaga kerja, operasi, dan hasil. Kriteria tersebut harus berlandaskan pada visi misi SMK, yang menjadi nilai dan konsep utama arah pengembangan sekolah, sehingga dapat memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Provinsi Aceh dalam Angka*. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Aceh.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Lhokseumawe dalam Angka*. Lhokseumawe: Badan Pusat Statistik Aceh.
- Bogdan, Robert C. dan Sari Knopp Biklen. (1998). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn & Bacon.
- Dayanandan. (2013). Good Governance Practice for Better Performance of Community Organizations-Myths and Realities. *Journal of Power, Politics & Governance*, 1:(1).
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. (2019). *Daya Saing SMK Dalam Bursa Tenaga Kerja 4.0*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- FEDSAS. (2015). *Governance in Public Schools: A Guide To The Application Of The King Principles In Public Schools*. The Institute of Directors in Southern Africa.
- Indriyani, Tuti. 2018. Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan Swasta dalam Peningkatan Keunggulan Bersaing. *Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Al Izzah*, 13: (1).
- Jindai, Neena. (2014). Good Governance: Needs And Challenges. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 5: (5).
- Kefela, Ghirmai. (2011). Good governance enhance the efficiency and effectiveness public spending-Sub Saharan countries. *African Journal of Business*.
- Lincoln, Yvonna S. dan Egon G. Guba. (1985). *Naturalistic Inquiry*. California: SAGE Publications.
- Matthew B., dan A. Michael Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Saparniene, D., & Valukonyte, I. (2012). Implementation of Good Governance Principles in Local Self government: the Case of Siauliai City. *Socialiniai tyrimai*, 3: (28).



- Vyas-Doorgapersad, S., & Aktan, C. C. (2017). Progression from ideal state to good governance: an introductory overview. *International Journal Of Business And Management Studies*, 9: (1).
- Wahab, A. Z., & Rahayu, S. (2013). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good University Governance Terhadap Citra Serta Implikasinya Pada Keunggulan Bersaing Perguruan Tinggi Negeri Pasca Perubahan Status Menjadi BHMN (Survei Pada Tiga Perguruan Tinggi Negeri Berstatus BHMN di Jawa Barat). *Jurnal Administrasi Pendidikan*, XVII: (1).
- Wibowo, N. (2016). Upaya Memperkecil Kesenjangan Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Tuntutan Dunia Industri. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 23 (1).